

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah unsur terpenting dalam pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak digunakan untuk pembiayaan dalam pelayanan publik dan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pajak memiliki bagian yang sangat besar yaitu sekitar 3/4 dari keseluruhan penerimaan negara, hal ini dikarenakan penerimaan negara yang berasal dari sektor minyak dan gas bumi semakin menurun maka pemerintah meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak (Peran Strategis, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2017).

Pajak memiliki peran yang besar dalam APBN, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan menambah jumlah wajib pajak baru, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak (Tinjauan Fungsi Utama, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2017).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati (KPP Pratama Pati) merupakan satu dari 16 KPP yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. KPP Pratama Pati mencatatkan selama 4 tahun terakhir terjadi peningkatan

penerimaan pajak yang cukup signifikan seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 1.1. Sedangkan untuk tahun 2018, KPP Pratama Pati menargetkan dapat menampung pajak sebesar Rp 786 Miliar atau meningkat sebesar Rp 150 Miliar dari penerimaan pajak tahun 2017. Kenaikan target ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa wajib pajak mulai taat untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak (<https://www.seputarmuria.com>)

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak KPP Pratama Pati tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>
<b>2014</b>	<b>Rp 338.120.129.418,00</b>
<b>2015</b>	<b>Rp 415.718.884.070,00</b>
<b>2016</b>	<b>Rp 540.471.548.191,00</b>
<b>2017</b>	<b>Rp 635.937.913.802,00</b>

Sumber: KPP Pratama Pati

Rasio kepatuhan wajib pajak wilayah Pati hingga tahun 2016 masih cukup rendah, yaitu dikisaran 50-60%, ini masih jauh dari standar kepatuhan wajib pajak yang ada yaitu 70% (<https://wartapati.com>). Di tahun 2017 terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang sangat signifikan seperti yang terlihat di Tabel 1.2. Meski terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun hal ini belum mampu mencapai target kepatuhan wajib pajak yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Pati.

**Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pati tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio Kepatuhan</b>
<b>2014</b>	<b>64,37%</b>
<b>2015</b>	<b>65,37%</b>
<b>2016</b>	<b>68,92%</b>
<b>2017</b>	<b>91,15%</b>

Sumber: KPP Pratama Pati

Kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh KPP Pratama Pati bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak di

daerah Pati. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan yaitu mengenai pentingnya pajak untuk pembiayaan pembangunan nasional, sosialisasi mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta batas waktu pelaporan dan denda atau sanksi jika terjadi keterlambatan pelaporan (<https://www.seputarmuria.com>), (<https://www.suaramerdeka.com>).

Menurut Saragih (2013) dalam (Purba, 2016) kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Adanya peningkatan dalam penerimaan pajak dikarenakan oleh meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berhubungan langsung dengan kepatuhan wajib pajak (Setiyani dkk, 2018). Semakin tinggi kesadaran seseorang maka semakin tinggi pula kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak (Boediono dkk, 2018). Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah menurut Putra (2017) dalam (Oktadini dkk, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian Setiyani, dkk (2018), Boediono, dkk (2018), Oktadini, dkk (2018), Sitorus dan Fauziyati (2016) dan Wulandari (2015) yang menunjukkan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis) dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif) (Sitorus dan Fauziyati, 2016). Menurut Setiyani, dkk (2018) motivasi membayar pajak merupakan kekuatan potensial dari wajib pajak yang bisa melatarbelakangi untuk membayar pajak secara sukarela. Menurut Ginting, dkk (2018) dengan adanya motivasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyani, dkk (2018) menunjukkan jika motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Ginting, dkk (2017) dan Sitorus dan Fauziyati (2016) menunjukkan jika motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Wulandari, 2015). Adanya sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan (Boediono, dkk, 2018). Penelitian Boediono, dkk (2018), Wardani dan Wati (2018), serta Wulandari (2015) menunjukkan jika sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian Lianty (2017) yang menunjukkan jika sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan diharapkan akan membuat wajib pajak sadar dan patuh akan peraturan perpajakan (Wulandari, 2015). Ginting, dkk (2017) mengatakan bahwa tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai tata cara memenuhi kewajiban perpajakan, fungsi dan peranan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyani, dkk (2018), Ginting, dkk (2017), Lianty (2017), serta Wulandari (2015) menunjukkan jika pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian Oktadini, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Setiyani, dkk (2018). Alasan peneliti melakukan replikasi yaitu untuk menguji kembali kebenaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyani, dkk (2018) menggunakan dua variabel independen yaitu motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Sedangkan pada penelitian ini ditambahkan satu variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan karena sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tersebut patuh (Wardani dan Wati, 2018).

Selain itu, dengan adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak menjadi paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak (Winerungan, 2013).

Perbedaan yang kedua dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian Setiyani, dkk (2018) obyeknya yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama di Kota Semarang, sedangkan obyek penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak dengan judul **“PENGARUH MOTIVASI WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati)”**.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis membatasi masalah yang ada agar tidak meluas dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, maka ruang lingkup yang akan penulis teliti yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati.
2. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh variabel yang digunakan yaitu motivasi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.



### 1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
4. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
8. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening?
9. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening?
10. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak
2. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak
3. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak
4. Untuk menguji apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
7. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
8. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
9. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
10. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi



### 1.5. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan dan informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat menjadikan wajib pajak lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.